

### III. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2017

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																	
	1) Penyempurnaan hasil Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan Hasil analisis jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	65.000.000,00
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil penyempurnaan pada jabatan															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	2) Penyempurnaan Hasil Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan hasil ABK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	85.000.000,00
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	3) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	130.000.000,00
			b. Penerapan hasil pada jabatan															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
		1 Dokumen	d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4)	Penyempurnaan <i>job grading</i>	Dokumen <i>job grading</i> yang disempurnakan	a. Penyusunan rencana penyempurnaan <i>job grading</i>														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	75.000.000,00	
		1 Dokumen	b. Penyempurnaan <i>job grading</i> untuk seluruh jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan																
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring penyempurnaan <i>job grading</i>																
			d. Penerapan hasil <i>job grading</i> pada penentuan sistem penggajian																
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																
			f. Evaluasi																
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017																
5)	Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)	Dokumen rencana kebutuhan PNS yang sudah disempurnakan	a. Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)														BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		1 dokumen	b. Penerapan hasil pada rekrutmen																
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			d. Evaluasi																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017																
6)	Penyempurnaan sistem rekrutmen PNS (persiapan untuk rekrutmen 2017)	Sistem rekrutmen yang sudah diperbaiki	a. Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai (persiapan untuk rekrutmen 2017)														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		1 sistem	b. Uji coba sistem baru																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7)	Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru (tahun 2017)	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 – 2017															
8)	Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	Persentase pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		90%	b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka															
			c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 – 2017															
9)	Penyempurnaan Hasil Evaluasi Jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan	a. Lanjutan Penerapan hasil evaluasi jabatan pada Sistem Manajemen SDM Aparatur														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	250.000.000,00
		1 Dokumen	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 – 2017															
10)	Review penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Review penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Penggunaan hasil <i>assessment</i> untuk pengelolaan SDM															
		70%	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 – 2017															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11)	Updating kebutuhan dan rencana pengembangan PNS untuk tahun 2018-2019	Dokumen rencana pengembangan PNS	a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan PNS														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		1 dokumen	b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS															
12)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan PNS sesuai kebutuhan	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai 5,2%	a. Pelaksanaan pengembangan PNS															
			b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pengembangan PNS															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
13)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS	Aplikasi rencana penempatan dan pola karier PNS	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional	Sudah disusun tahun 2015														
			b. Penerapan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
14)	Lanjutan Penerapan rencana penempatan dan pola karier	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 70%	a. Penerapan rencana penempatan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM															
			b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
15)	Penyusunan sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana pembangunan sistem manajemen kinerja PNS	Sudah disusun tahun 2015														
			b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja PNS dan pengembangannya															
			c. Uji coba															
			d. Penyempurnaan hasil uji coba															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
16)	Lanjutan Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	Persentase SKPD yang menerapkan Sistem	a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai													BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017														
	17)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian	Jumlah sosialisasi	a. Penyusunan rencana sosialisasi												BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
			3 kali	b. Pelaksanaan Sosialisasi													
				c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring													
				d. Evaluasi													
				e. Tindak lanjut hasil evaluasi													
	18)	Penerapan kebijakan kepegawaian	Jumlah kebijakan kepegawaian yang diterapkan	a. Penyusunan rencana penerapan aturan kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban PNS													
			1 Peraturan	b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi)													
				c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring													
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 – 2017														
19)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan kepribadian <i>role model</i>	Persentase Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian	a. Lanjutan Pelaksanaan pengembangan <i>role model</i> bagi para pejabat														
		100%	b. Pelaksanaan pengembangan <i>role model</i> bagi para pejabat														
			c. Penerapan <i>role model</i> bagi seluruh pejabat														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	20) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM b. Tindak lanjut hasil monitoring														Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
	21) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM																
	22) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM																
	23) Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2016	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2016																
	24) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota Malang	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
	2.	1) Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS	Persentase PNS yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar 25%	a. Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS															
				b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
				c. Evaluasi															
d. Tindak lanjut hasil evaluasi																			
	Peningkatan disiplin aparatur																		
	1) Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS	Persentase PNS yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar 25%	a. Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi														BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2)	Lanjutan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang telah ditindaklanjuti	a. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan disiplin PNS		■											BKD Inspektorat Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		100%	b. Pembentukan Tim pembinaan disiplin PNS			■											
			c. Pelaksanaan pembinaan disiplin PNS				■	■	■	■	■	■	■				
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan					■	■	■	■	■	■	■			
			e. Evaluasi						■					■			
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan																
1)	Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dalam asistensi pembahasan  30 Ranperda	a. Penyusunan rencana kerja asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	■											Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	350.000.000,00	
			b. Pelaksanaan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
			d. Evaluasi						■					■			
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
2)	Workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Tingkat partisipasi masyarakat dalam workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD  80%	a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan workshop	■										Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	400.000.000,00		
			b. Pelaksanaan kegiatan workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD		■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan		■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
			d. Evaluasi						■							■	
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017		■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3)	Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD	■												Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	850.000.000,00
			b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		30 Ranperda	c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		e. Evaluasi					■										
		f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
4)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota	Jumlah Ranperwali dan Rankepwali yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD	■												Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	110.000.000,00
			b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		60 Ranperwali 500 Rankepwali	c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		e. Evaluasi					■										
		f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
5)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi	■											Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	350.000.000,00	
			b. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		20 Perda 20 Perwali	c. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota															
			d. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota															
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
			f. Evaluasi															
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017															
6)	Redokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Produk Hukum Daerah yang disusun	a. Identifikasi produk hukum daerah yang perlu didokumentasikan kembali														Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000,00
		5 Dokumen	b. Penyusunan rencana pendokumentasian kembali produk hukum daerah															
			c. Pelaksanaan pendokumentasian kembali produk hukum daerah															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 - 2017															
7)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	h. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan														Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		80%	i. Tindak lanjut hasil monitoring															
8)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan															
		80%																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi															
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan															
	10) Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2016	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2016															
11) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Malang	80%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi																
	100%	b. Pelaksanaan koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan																
		c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
		d. Evaluasi																
		e. Tindak lanjut hasil evaluasi																
4.	Penguatan Pengawasan																	
1)	Penyusunan kebutuhan tenaga fungsional Auditor dan P2UPD	Jumlah Auditor	<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>														BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		12 orang																
Jumlah P2UPD																		
9 orang																		
2)	Penyusunan rencana pengembangan Auditor dan P2UPD	Persentase Auditor dan P2UPD yang memperoleh peningkatan kompetensi	<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>															
		100%																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)				
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	Persentase evaluasi SPIP SKPD %	a. Penyusunan rencana evaluasi penerapan SPIP b. Sosialisasi instrumen evaluasi SPIP	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018				
4)	Lanjutan Penerapan SPIP pada SKPD yang belum melaksanakan/belum optimal melaksanakan	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP 90%	a. Lanjutan penerapan SPIP di SKPD b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017																		
5)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD untuk tahun 2017	Opini BPK WTP	Penyusunan rencana monitoring																		
6)	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan	Jumlah Sosialisasi 4 kali	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan																		
7)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD tahun 2017	Opini BPK WTP	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD b. Tindak lanjut hasil monitoring																		
8)	Sosialisasi LHKPN	Jumlah Sosialisasi 2 kali	Sosialisasi LHPKN	Sudah dilaksanakan tahun 2015												BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja					
9)	Asistensi Pengisian LHKPN bagi pejabat	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN 100%	a. Asistensi Pengisian LHKPN bagi pejabat b. Monitoring penyerahan LHKPN	Sudah dilaksanakan tahun 2015 dan 2016																	
10)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja					
11)	Lanjutan Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN																		
12)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN																		

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
13)	Lanjutan Penerapan <i>wistleblower</i>	Persentase jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	a. Lanjutan Penerapan <i>wistleblower</i>															
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 dan 2017															
14)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring															
15)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan															
		80%																
16)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi															
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan															
17)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2016	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2016															
		80%																
18)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		100%	b. Penyusunan prioritas															
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan															
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3)	Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Jumlah SOP yang telah diterapkan	a. Penyusunan SOP baru/ penyempurnaan SOP yang ada di SKPD													SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		150 SOP	b. Penerapan SOP di SKPD														
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi hasil penerapan														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 - 2017														
4)	Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Perda	a. Perencanaan penyusunan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	Sudah disusun tahun 2015												BP2T Bagian Hukum Bagian Organisasi Kerja Sama dan Penanaman Modal Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
		2 Dokumen	b. Pengkajian penerapan sistem PTSP														
			c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP														
			d. Pembahasan dengan melibatkan seluruh seluruh stakeholder														
			e. Tindak lanjut hasil pembahasan														
			f. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses legislasi														
			g. Legislasi Rancangan Perda														
5)	Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin	Rancangan Peraturan Walikota	a. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015													
		1 Ranperwal	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota														
			c. <i>Workshop</i> pembahasan Rancangan Peraturan Walikota														
			d. Tindak lanjut hasil <i>workshop</i>														
			e. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses penetapan														
			f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin														
			g. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
		h. Evaluasi	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015														
		i. Tindak lanjut hasil evaluasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																		
	1) Peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin	Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Tim untuk	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap permohonan izin															BP2T Tim Teknis Perizinan	255.300.000,00
		11.707 Rekom	b. Pembentukan Tim Teknis Perizinan															Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
			c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 – 2017																
	2) Peninjauan lapangan dan pengawasan izin	Rekomendasi Tim Pengawasan Perizinan	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap izin yang diterbitkan															BP2T Tim Pengawasan Terpadu Perizinan	255.300.000,00
		11.707 Rekom	b. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan															Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
			c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis hasil pengawasan																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 – 2017																
	3) Pelayanan Mobil Keliling	Layanan izin trayek keliling 4 kali/bulan	a. Penyusunan rencana layanan mobil keliling															BP2T Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	58.300.000,00
			b. Penyiapan sarana, prasarana dan petugas layanan																
			c. Pelaksanaan layanan																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 – 2017																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4)	Lanjutan Penerapan SIM Perizinan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	a. Lanjutan Penerapan SIM Perizinan														BP2T Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	145.000.000,00	
		90%	b. Monitoring pelaksanaan SIM Perizinan																
			c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring																
			d. Evaluasi terhadap penerapan																
5)	Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penyusunan rencana survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan														Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		80%	b. Penyusunan instrumen survei dan uji cobanya																
			c. Pelaksanaan survei																
			d. Pengolahan data dan analisis hasil survei																
			e. Penyusunan rekomendasi																
6)	Pengkajian penerapan PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Pengkajian penerapan PTSP	Sudah dilaksanakan tahun 2016															
			b. Penyusunan kerangka sistem PTSP																
		80%	c. Penyusunan rencana penerapan																
			a. Penerapan PTSP sesuai rencana																
			d. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																
			e. Evaluasi																
7)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk <i>quick wins</i>	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Lanjutan Penerapan PTSP sebagai <i>quick wins</i>														BP2T SKPD terkait Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		80%	b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan																
			c. Evaluasi																
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																
8)	Pengembangan PTSP ( <i>quick wins</i> ) untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penyusunan rencana pengembangan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif																
		80%	b. Penyiapan PTSP (sistem, mekanisme kerja, penggunaan teknologi informasi, SDM, sarana dan prasana, dst.)																



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			c. Pelaksanaan PTSP															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2018														
	9) Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	b. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi <i>quick wins</i>															
		80%	c. Monitoring dan tindak lanjut penerapan															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	2018														
	10) Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Persentase Unit Pelayanan yang telah melakukan pelayanan sesuai standar	a. Penyusunan rencana pelaksanaan monev ke Unit Pelayanan dalam rangka pelayanan publik															
			b. Pembentukan Tim Monev pelayanan publik															
			c. Penetapan parameter monev pelayanan publik															
			d. Pelaksanaan monev pelayanan publik															
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan															
			f. Evaluasi															
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi	2018														
	11) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik															
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring															
	12) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik															
		80%																
	13) Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi															
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik															

No.	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
14)	Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Malang	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi														SKPD terkait Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
			b. Penyusunan prioritas															
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan															
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															
8.	Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu																	
1)	Sertifikasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008 40%	a. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008														SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Implementasi ISO 9001 : 2008															
			c. Audit Internal															
			d. Perbaikan hasil audit internal															
			e. Rapat Tinjauan Manajemen															
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi															
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi															
2)	Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008 40%	a. Review dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008														SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Implementasi ISO 9001 : 2008															
			c. Audit Internal															
			d. Perbaikan hasil audit internal															
			e. Rapat Tinjauan Manajemen															
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi															
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9.	Penataan Administrasi Kependudukan															Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	1) Pelayanan administrasi kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan	a. Pelayanan administrasi kependudukan														
		90%	b. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	2018													
	2) Penerapan SIM data base kependudukan	SIM data base kependudukan	a. Penerapan SIM data base kependudukan														
		1 sistem	b. Monitoring pelaksanaan SIM data base kependudukan														
			c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring														
			d. Evaluasi terhadap penerapan														
			e. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tahun 2016 - 2017														
	3) Pengelolaan Maintenance Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	a. Penyusunan pengelolaan maintenance jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan	Sudah dilaksanakan tahun 2015													
		1 Jaringan Pelayanan Administrasi kependudukan	b. Identifikasi Trouble Shooting jaringan														
			c. Maintenance jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan														
			d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan														
e. Evaluasi																	
f. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
4) Pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	a. Penyusunan rencana pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
	1 sistem	b. Persiapan sarana dan prasaran Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan															
		c. Uji coba															
		d. Penyempunaan hasil uji coba															
		e. Penerapan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			f. Monitoring dan tindak lanjut penerapan															
			g. Evaluasi															
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	Dokumen hasil monev dan pelaporan administrasi kependudukan	a. Penyusunan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		2 Dokumen	b. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan															
			c. Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan															
			d. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi															
			e. Penyusunan pelaporan administrasi kependudukan															
10.	Quick Wins																	
	1) Pengembangan sistem informasi pelayanan kependudukan di Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kelurahan	a. Identifikasi Kelurahan untuk penerapan sistem informasi pelayanan kependudukan berbasis <i>online</i> (diselaraskan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan)	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
		90%	b. Penyusun sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
			c. Uji coba sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
			d. Penyempurnaan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
			e. Penerapan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
		% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	f. Monitoring pelaksanaan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2016												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kominfo Kelurahan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		90%	g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
			h. Evaluasi terhadap penerapan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
			i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi															
			j. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya															Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2)	Penerapan pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015														
	a) Pengkajian pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015														
	b) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015														
	c) Penyusunan rancangan pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015														
	d) Uji coba			Sudah dilaksanakan tahun 2015														
	e) Penyempurnaan hasil uji coba			Sudah dilaksanakan tahun 2015														
	f) Sosialisasi			Sudah dilaksanakan tahun 2015														
	g) Lanjutan Penerapan pelayanan perizinan paralel	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan paralel 80%	Penerapan pelayanan perizinan paralel	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
	h) Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	(1) Monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
			(2) Tindak lanjut hasil monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016														
i) Evaluasi			Sudah dilaksanakan tahun 2016												BP2T Bagian Organisasi Bagian Hukum Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013- 2018		
j) Pemeliharaan dan pengembangan pelayanan perizinan paralel		(1) Pemeliharaan pelayanan perizinan paralel yang sudah berjalan baik																
		(2) Pengembangan pelayanan perizinan paralel untuk jenis-jenis pelayanan baru																
		(3) Penerapan pelayanan perizinan paralel																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
11.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																			
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	Jumlah SKPD yang telah menandatangani Pakta Integritas 100 SKPD	Penandatanganan Pakta Integritas	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat SKPD terkait Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018			
	2) Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang disiapkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 1 SKPD	Penyiapan 1 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																	
	3) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 1 SKPD	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																	
	4) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 9 SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2017	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 80%	a. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 8 SKPD b. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 1 SKPD tahun 2017																	
	5) Monitoring dan Evaluasi	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring b. Evaluasi																	
	6) Pelaksanaan perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya																	
	7) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 80%	a. Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM																	



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2)	Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
		80%	b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan)	Sudah dilaksanakan tahun 2015													
			c. Penerapan hasil penataan														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016 - 2017														